



Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan: Tantangan dan Hambatan

Khasnita Sari^{1*}, Yenni Samri Juliati Nasution², Laylan Syafina³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara 20235, Indonesia

^{1*}khasnitasari13@gmail.com, ^{1*}khasnitasari13@gmail.com,

*Corresponding author

doi.org/10.33795/jraam.v7i2.009

Informasi Artikel

Tanggal masuk	29-08-2024
Tanggal revisi	22-09-2024
Tanggal diterima	30-09-2024

Keywords:

Analysis;
Financial Accounting Standards;
Preparation of Financial Reports.

Abstract: Preparation of Financial Statements Based on Financial Accounting Standards: Challenges and Obstacles

Purpose: To assess the alignment of financial report preparation with accounting standards at the Ministry of Religion in Bener Meriah.

Method: The study uses a qualitative approach with a case study method.

Results: Financial report preparation largely aligns with Financial Accounting Standards and includes the Balance Sheet, Statement of Changes in Equity, and Cash Flow Statement.

Novelty: This research highlights challenges and obstacles in preparing financial reports based on Financial Accounting Standards to achieve stable financial reporting for government entities.

Contribution: Offers solutions for stability in standard-compliant financial reporting.

Kata kunci:

Analisis;
Penyusunan Laporan Keuangan;
Standar Akuntansi Keuangan.

Abstrak: Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan: Tantangan dan Hambatan

Tujuan: Mengetahui kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.

Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil: Penyusunan laporan keuangan sebagian besar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, meliputi Neraca, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas.

Kebaruan: Menyajikan tantangan dan hambatan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK untuk menciptakan pelaporan keuangan stabil pada entitas pemerintahan.

Kontribusi: Memberikan solusi penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan yang stabil.



1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan memiliki urgensi

untuk dilaksanakan dalam segala entitas, termasuk yayasan dan entitas nirlaba. Urgensi tersebut didasarkan pada fungsi dari laporan

keuangan sebagai sarana pengawasan dan evaluasi kinerja manajemen organisasi [1] [2], sebagai alat untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran [3] dan sarana komunikasi yang menghubungkan manajemen organisasi dengan pemangku kepentingan dan perincian atas aset keuangan di suatu perusahaan [4]. Pembuatan laporan keuangan menjadi tugas penting yang harus dilakukan.

Institut Akuntan Indonesia menetapkan kriteria untuk persiapan laporan keuangan. *The Indonesian Institute of Accountants* (IAI) merilis standar untuk Persiapan Laporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 17 Juli 2009. Standar ini mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP terdiri dari neraca saldo, laporan laba dan kerugian, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan [5]. Laporan Keuangan yang disusun setiap akhir tahun merupakan laporan yang berisi mengenai aktivitas pencapaian yang dilakukan. Laporan keuangan adalah salah satu proses dilakukannya penyusunan data informasi mengenai keuangan berdasarkan standar, target, dan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah dasar untuk menilai tingkah laku orang ketika menjalankan perannya secara teratur [6].

Proses pembentukan rekening dalam laporan keuangan atau laporan pendapatan yang memenuhi definisi elemen disebut pengenalan elemen laporan keuangan. Contohnya, aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan akan mengalir ke entitas dan biaya mereka dapat diukur secara andal. Kewajiban diakui dalam laporan keuangan ketika sumber daya yang mewakili manfaat ekonomi akan ditambahkan untuk menyelesaikan kewajiban entitas, dan jumlahnya perlu diukur secara andal. Ekuitas adalah bagian yang tersisa dari aset entitas setelah semua kewajiban dikurangkan. Pendapatan diakui dalam laporan pendapatan ketika ada peningkatan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan peningkatan

aset. Perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penelitian yaitu menggali implementasi SAK di Kementerian Agama yang belum banyak diteliti sebelumnya, serta memberikan wawasan tentang tantangan spesifik yang dihadapi dalam konteks lembaga pemerintah non-profit, yang berbeda dari penelitian lain yang lebih umum.

Menurut Lubis dan Ovami, penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan Organisasi [1]. Menurut Abriano, Yusuf, dan Aulia Rahmah penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [6]. Laporan keuangan tidak hanya mengungkapkan kondisi keuangan tetapi juga penggunaan sumber daya dan akuntabilitas manajemen [7]. Menurut Saidah, semua hal keuangan harus dilaporkan kepada mereka yang berwenang untuk meninjau rekening keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan [8]. Kegiatan ini diperlukan untuk menjamin bahwa kantor tidak mengalami pengecualian apa pun.

Persiapan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Persiapan laporan keuangan dapat memudahkan dalam perencanaan kebijakan di masa depan dan pemberian pinjaman dari lembaga keuangan atau bank. Laporan keuangan diperlukan oleh Kementerian Agama untuk menggambarkan kinerja bisnisnya dan berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat menggunakan SAK 01 yang disajikan dengan cara yang sederhana. Namun, proses implementasi tidak semudah tampaknya. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang standar akuntansi yang berlaku untuk perusahaan. Kesiapan perusahaan adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi [9].

Kementerian Agama bertanggung

jawab atas organisasi pemerintahan di bidang agama. Kementerian Agama adalah unit kerja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan agama. Kementerian Agama juga diminta untuk menghasilkan laporan akuntansi dan akuntabilitas untuk mendukung pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara. (APBN). Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah [7]. Departemen keuangan pada Kementerian Agama bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan. Departemen keuangan memiliki wewenang untuk melaporkan semua hal keuangan kepada mereka yang memiliki hak untuk meninjau pada waktu yang telah ditentukan. Kegiatan peninjauan membutuhkan laporan keuangan yang tepat waktu untuk mencegah pengecualian apa pun [10].

Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2005. Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Kabupaten sebelumnya terikat dengan Central Aceh Kabupaten, yang berada di dalam Kantor Regional Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pada tahun 2005, Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Kabupaten menjadi independen dan berhenti dikaitkan dengan Central Aceh Kabupaten, yang sebelumnya merupakan distrik induk.

Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Kabupaten mulai beroperasi secara definitif pada tahun 2005 setelah inaugurasi H. Ilyas AR. S.Ag sebagai Kepala Pertama Kantor *Ministry of Religion* dari Kepala Kantor Regional Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. H. Abdurrahman TB, LT. Kelas MIN 1 Simpang Tiga adalah lokasi dari Bener Meriah *Ministry of Religious Affairs*. Kepala Kantor Regional Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. H. Abdurrahman TB, LT, mendirikan Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Kabupaten pada tanggal 31 Juli 2008. Bangunan kedua dibangun secara

bertahap dengan bantuan APBN tahun 2007 yang didirikan oleh *Regent of Bener Meriah*, Mr. Ir.H. Tagore Abu Bakar. Anggaran untuk bangunan kedua berasal dari bantuan BRR tahun 2007.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa organisasi nirlaba sering kali mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun teknologi yang digunakan. Namun, kajian tentang pelaksanaan SAK ETAP di Kementerian Agama masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi lembaga nirlaba dalam pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berguna bagi pemangku kepentingan untuk memastikan dana yang telah diberikan dikelola secara baik dengan sebagaimana mestinya. Penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dapat menilai kelayakan praktik akuntansi serta dapat membuat laporan keuangan yang memiliki daya banding tinggi saat dipublikasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi penerapan SAK di Kementerian Agama Bener Meriah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pelaporan. Kontribusi dari penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi akuntansi di lembaga pemerintahan nirlaba, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa depan.

Akuntansi yang transparan dan akuntabel semakin diakui pada tingkat global, terutama bagi organisasi yang mengelola dana publik. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik akuntansi yang lebih baik di sektor nirlaba. Penelitian ini menyoroti mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana sumbangan. Pelaporan keuangan berbasis SAK mungkin tidak menjadi kewajiban bagi semua entitas kementerian agama, namun penerapan standar ini tetap relevan dan krusial untuk menjamin transparansi dan kepercayaan publik.

Penelitian ini tidak hanya fokus pada lokasi yang berbeda tetapi juga memberikan pendekatan baru dalam memahami konteks akuntansi di lembaga pemerintah non-profit. Penelitian ini membahas mengenai implementasi SAK ETAP secara mendalam di Kementerian Agama, yang sebelumnya tidak banyak dikaji secara spesifik. Penelitian ini merujuk pada keterbatasan penelitian terdahulu, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan *insight* baru dan meningkatkan pemahaman tentang pelaporan keuangan di sektor nirlaba.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk menggambarkan dan memahami kondisi nyata di lapangan terkait pelaporan keuangan berbasis SAK di Kantor Kementerian Agama Bener Meriah, Aceh. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dan menyajikannya dalam bentuk uraian naratif.

Data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tiga informan yang merupakan pegawai di Kantor Kementerian Agama Bener Meriah. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan di lembaga tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan dalam wawancara mencakup topik-topik seperti tantangan dalam penerapan SAK, prosedur pelaporan, dan akurasi laporan keuangan. Wawancara

direkam dengan izin informan untuk memastikan semua informasi yang diberikan dapat ditelusuri kembali.

Penelitian juga dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian untuk memahami lebih baik konteks kerja dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini melibatkan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti laporan keuangan dan pedoman akuntansi yang digunakan di Kementerian Agama. Tahap awal penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian dan menyusun pedoman wawancara. Peneliti juga mempersiapkan izin untuk melakukan wawancara dan observasi di lokasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan. Setiap sesi wawancara dicatat dan dikategorikan berdasarkan tema yang relevan. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaporan keuangan berbasis SAK di Kantor Kementerian Agama. Temuan ini disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan tantangan, praktik baik, dan rekomendasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan wawancara, Kantor Kementerian Agama menghadapi beberapa masalah operasional. Salah satu masalah tersebut adalah ketidaksesuaian antara pendapatan tunai dan pengeluaran dalam anggaran laporan keuangan, serta gangguan jaringan internet yang sering menyebabkan penundaan dalam pelaporan keuangan. Masalah ini dapat menjadi elemen yang berkontribusi pada akurasi atau ketepatan waktu laporan keuangan.

Sistem aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan di kantor sering menunjukkan cacat yang secara signifikan mempengaruhi keakuratan laporan. Kantor juga dilengkapi dengan sumber daya yang usang dan terbatas, seperti laptop, komputer, dan printer yang tidak lagi berfungsi dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada penggunaan aplikasi SAK di Bener Meriah Kementerian Agama Aceh didapatkan pernyataan informan mengenai penggunaan aplikasi SAK terhadap laporan keuangan, diantaranya;

Informan 1:

“Laporan pertanggung jawaban keuangan harus mematuhi norma-norma standar akuntansi yang berlaku, keterbacaan, materialitas, kebenaran, komparabilitas, dan pengungkapan penuh”

Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan aplikasi SAK terhadap laporan keuangan sebagai alat transparansi yang mampu mencerminkan kinerja keuangan suatu lembaga dalam periode tertentu.

Informan 2:

“Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan pedoman yang harus diikuti untuk memastikan kualitas dan transparansi laporan keuangan kita”

Hal ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi yang spesifik, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

Melalui kegiatan wawancara diketahui bahwa pengelola keuangan bertanggung jawab atas sistem pencatatan laporan keuangan. Pengelola keuangan juga bertanggung jawab dalam mengambil catatan dan memasukkannya ke dalam aplikasi SAKTI (*Agency Level Financial Application System*), yang mencakup seluruh proses

manajemen keuangan termasuk anggaran, implementasi, dan pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor Kementerian Agama di Bener Meriah Regency terdiri dari Laporan Akuntabilitas Pengeluaran (LPJ), Laporan Inventaris, dan Laporan Properti Negara (BMN). Biaya yang dialami di Bener Meriah *Regency Ministry of Religion Office* terdiri dari biaya yang terkait dengan pembelian barang dan menutupi biaya yang berkaitan dengan karyawan. Kementerian Agama menggunakan pendekatan akumulasi sebagai dasar untuk mempersiapkan laporan keuangan.

Kantor Kementerian Agama Bener Meriah sebagian besar mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kantor Kementerian Agama telah menyiapkan laporan keuangan yang mencakup Laporan Keseimbangan, Laporan Perubahan Keuangan, dan Laporan Aliran Uang. Selama persiapan laporan keuangan, laporan keuntungan dan kerugian tidak dihasilkan. Kementerian Agama bukan entitas komersial, sehingga tidak berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang memperjelas keuntungan dan kerugian. Laporan laba dan kerugian mencakup pendapatan, biaya, keuntungan, dan kehilangan.

Menurut temuan dari studi yang disebutkan di atas, Kantor Agama Indonesia sebagian besar menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) dalam menyiapkan laporan keuangan. Kantor Agama sering menghadapi gangguan jaringan internet yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Selama proses pembuatan laporan keuangan, terdapat kasus gangguan jaringan dan aplikasi yang sedang dalam proses pemeliharaan. Kantor Kementerian Agama di Bener Meriah Regency, Provinsi Aceh mengalami penundaan dalam mempersiapkan laporan keuangan karena tidak adanya fasilitas kantor yang mumpuni atau kondisi fasilitas kantor yang usang.

Ekspansi ekonomi yang cepat di zaman modern mengakibatkan akuntansi memiliki

peran penting dalam mentransmisikan informasi tentang transaksi perusahaan. Penyusunan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal adalah tujuan utama penyebaran informasi transaksi perusahaan. Panduan untuk persiapan laporan keuangan telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Indonesia [11]. Semua entitas yang bertanggung jawab secara publik, termasuk yang sudah terdaftar atau berencana untuk terdaftar diwajibkan untuk mematuhi Standar Akuntansi Keuangan. SAK ETAP (*Financial Accounting Standards Without Public Accountability*) digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan oleh Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency, Aceh [12]. Dalam rekening keuangan, aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran diberikan nilai moneter melalui proses pengukuran. SAK ETAP diterbitkan pada tahun 2018. Biaya historis dan nilai adil adalah dua basis pengukuran yang relevan.

Laporan arus kas, neraca saldo, perhitungan kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, dan komentar laporan keuangan membentuk laporan keuangan koperasi yang mematuhi kerangka kerja SAK ETAP [3]. Laporan keuangan perusahaan memberikan *snapshot* waktu melalui semua uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Tahapan yang dilakukan adalah merekam, mengklasifikasikan, meringkas transaksi moneter dengan sangat rinci [13]. Proses akuntansi yang tercantum dalam Undang-Undang melibatkan kegiatan merekam, mengklasifikasikan, dan meringkas secara akurat dan tepat transaksi keuangan dan peristiwa menggunakan mata uang rupiah, dan kemudian menganalisis hasilnya. Aset, kewajiban, pengeluaran, nilai bersih, pendapatan, perubahan ekuitas, dan arus kas adalah komponen yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Pembuatan akun keuangan ini menggunakan sejumlah sumber data yang berbeda. Sebaran jumlah kertas dapat dianggap sebagai dokumen, seperti tagihan, faktur, catatan kredit, laporan, dan catatan bank. Perusahaan menggunakan

akun keuangan untuk menilai kesehatan keuangan mereka sendiri. Laporan keuangan dimaksudkan untuk mengungkapkan rincian tentang status keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan setiap perubahan pada status perusahaan tersebut [14]. Pengguna laporan keuangan diharapkan menemukan informasi berharga guna membuat keputusan tentang hal-hal ekonomi.

Laporan keuangan yang mematuhi Standar Akuntansi Keuangan adalah laporan yang dianggap terbuka dan cocok untuk dibagikan kepada para pemangku kepentingan. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dalam presentasi mereka. Laporan keuangan harus mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menyediakan kerangka kerja metodologis. Pelaporan keuangan yang mematuhi SAK berpotensi memperbaiki sistem tata kelola di Kementerian Agama melalui transparansi dalam laporan keuangan.

Peningkatan pengawasan internal dapat memperkuat akuntabilitas. Pelaporan yang sistematis dapat menyebabkan pihak-pihak terkait menilai kinerja dan penggunaan anggaran secara lebih efektif. Penggunaan anggaran secara efektif merupakan sebuah upaya untuk mendukung proses pertanggung jawaban keuangan. Kelancaran proses akuntansi dipengaruhi oleh adanya struktur dasar terkait persiapan dan presentasi laporan dari awal peristiwa, identifikasi transaksi hingga presentasi akhir. Kerangka akuntansi atau kerangka konseptual adalah sebuah sistem penting yang memiliki tujuan dan karakteristik tertentu. Akuntansi dan laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sifat, fungsi, dan keterbatasan yang mempengaruhi pembentukan standar yang konsisten [15].

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency sebagian besar mematuhi standar akuntansi keuangan. Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan komprehensif terdiri dari Laporan Keseimbangan, Laporan Keuntungan dan Kerugian, dan Laporan Perubahan

Kuangan. Manajemen keuangan yang efektif adalah faktor penting dalam ekspansi dan pengembangan bisnis atau perusahaan. Akuntansi adalah alat yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengelola keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency, diharuskan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), bahkan jika laporan laba dan kerugian tidak dihasilkan. Kementerian Agama membutuhkan laporan keuangan untuk melihat dan menilai pertumbuhan suatu bisnis atau perusahaan. Penelitian ini menghubungkan temuan dengan studi-studi terdahulu tentang pelaporan keuangan di entitas serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dan Hidayati menunjukkan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting untuk menilai kesehatan keuangan [16].

Standar Akuntansi mencakup instruksi untuk persiapan laporan keuangan yang akurat dan dapat diterapkan secara universal oleh semua perusahaan, termasuk Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency. Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency juga harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan untuk mempersiapkan laporan keuangan [17]. Asosiasi Akuntansi Indonesia (IAI) adalah organisasi profesional yang bertanggung jawab untuk mengkompilasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui *Financial Accounting Standards Board* (DSAK) dengan mengakui pentingnya dan persyaratan implementasi praktik akuntansi untuk perusahaan kecil dan menengah (SMEs). Ikatan Akuntan Indonesia telah mengembangkan standar akuntansi yang memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan-perusahaan kecil dan menengah [18]. Perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas bisnis sangat mempengaruhi praktik akuntansi dan keuangan. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan menjadi alternatif yang menjanjikan untuk membantu dalam mencatat dan melaporkan keuangan menjadi lebih efisien

dibandingkan pencatatan secara manual [19]. Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, Kantor Kementerian Agama di Bener Meriah Regency, Aceh, menghadapi banyak masalah. Masalah tersebut antara lain gangguan yang sering terjadi di jaringan internet, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Gangguan ini merupakan penyebab yang berkontribusi pada akurasi atau penundaan waktu pelaporan keuangan. Fasilitas kantor seperti laptop dan komputer saat ini terbatas dan usang. Selain itu, printer tidak lagi berfungsi dengan efisien. Dengan beberapa keterbatasan tersebut, Kantor Kementerian Agama Bener Meriah sebagian besar telah mematuhi SAK (*Statement of Financial Accounting Standards*). Kementerian Agama tidak menghasilkan laporan laba dan kerugian. Gambar kendala dan Hambatan Penggunaan Aplikasi SAKTI Terhadap Laporan Keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kendala dan Hambatan Penggunaan Aplikasi SAKTI Terhadap Laporan Keuangan

Kementerian Agama harus menerapkan pelaporan keuangan yang terstandarisasi (berdasarkan SAK). Pelaporan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan public terutama dalam hal pengelolaan dana publik. Implementasi pelaporan keuangan yang baik dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaporan yang terstandarisasi dapat membantu semua pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga pengawas, untuk memahami posisi keuangan

dan kinerja entitas dengan lebih jelas. Pelaporan keuangan yang baik berkontribusi pada pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan yang efektif dan efisien berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, pengendalian internal yang lebih kuat, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama. Pelaporan yang terstandarisasi dapat mempermudah Kementerian Agama Bener Meriah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan aset. Upaya ini juga dapat menyebabkan pelaporan keuangan di masa mendatang lebih tepat waktu dan lebih jelas.

Kementerian Agama Bener Meriah menghadapi sejumlah kendala dalam pelaporan keuangan, termasuk banyak perangkat keras seperti laptop dan komputer yang sudah usang, serta keterbatasan dalam akses internet yang mengganggu proses pelaporan. Sering terjadinya gangguan jaringan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Aplikasi pelaporan keuangan yang sering menjalani pemeliharaan dapat mengakibatkan penundaan dan menurunkan akurasi data. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting agar pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.

4. Kesimpulan

Kantor Kementerian Agama Bener Meriah Regency, Aceh, sudah hampir mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam menyusun laporan keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh hasil dan pembahasan yang telah disajikan. Kantor Kementerian Agama telah membuat laporan keuangan yang mencakup Laporan Keseimbangan, Laporan Perubahan Keuangan, dan Laporan Aliran Uang. Selama persiapan laporan keuangan, Kantor Kementerian Agama tersebut tidak menyusun laporan laba dan kerugian. Kantor Kementerian Agama mengalami banyak rintangan dalam menyusun laporan keuangan.

Rintangan tersebut antara lain fasilitas yang tidak memadai atau peralatan yang telah digunakan untuk jangka waktu yang lama dan tidak lagi lancar dalam operasi, gangguan jaringan internet yang menyebabkan penundaan waktu pelaporan keuangan, dan gangguan jaringan dan aplikasi yang mengalami pemeliharaan.

Wawancara yang dilakukan dengan tiga informan memberikan pemahaman bahwa dalam kantor kementerian agama terdapat beberapa permasalahan terkait penggunaan aplikasi SAKTI terhadap laporan keuangan yaitu; kantor kementerian agama sering mengalami gangguan jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan waktu pelaporan keuangan, sistem aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan sering mengalami gangguan eror yang berdampak pada laporan keuangan, fasilitas kantor seperti laptop atau komputer masih sangat minim, dan peralatan yang sudah lama seperti printer yang tidak dapat digunakan dengan lancar. Kantor Kementerian Agama juga tidak memiliki bimtek yang baik terkait aplikasi SAK yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi SAK.

Temuan terkait permasalahan pelaporan keuangan yang terlambat dan aplikasi pencatatan keuangan yang terganggu selama proses mengharuskan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Aceh menerapkan fasilitas kantor baru dan modern. Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Aceh diharapkan mampu menerapkan pelaporan yang lebih terstandarisasi, transparan, dan lebih bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan aset. Penerapan upaya ini dilakukan agar tidak terjadi selisih antara penghasilan dan pengeluaran dalam pelaporan keuangan di masa mendatang. Kementerian Agama juga diharapkan dapat menerapkan program pendampingan dengan tujuan memberikan pelatihan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan keuangan berdasarkan SAK ETAP [20].

Hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan adalah komponen yang bersinergi positif dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pada kantor agama dalam wilayah Provinsi Aceh [21].

Daftar Rujukan

- [1] Ovami, Fitri. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (Studi Kasus: Yayasan Pesantren Al-Husna) 2019 <https://www.researchgate.net/publication/343600979>.
- [2] Fitriah A, Hidayati C. Analisis Kepatuhan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Credit Union Sekawan Maju di Surabaya. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. 2022; 2(1):212–26.
- [3] Nining AR. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Jurnal Akuntansi* 2020;06(01);87
- [4] Oktavia PD, Sunrowiyati S. "Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan UD. Karya Tunggal. *Jurnal PETA* 2019; 4 (1) :16–32.
- [5] Fadlol MA, Kartini T, Kantun S. Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2018; 12 (01):270. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.857.0.2018>.
- [6] Renaldi S, Haninum H. Implementasi Software Akuntansi Dalam upaya Meningkatkan Kinerja Pelaporan Keuangan (Studi Kasus CV. Agro Karya Utama). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 2023;11(01);263
- [7] Rahmah A. Analisis Efektif Dan Efisiensi Realisasi Laporan Keuangan Pada Kantor Kementerian AGAMA Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019-2021. 2023. Skripsi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas nahdatul ulama kalimantan selatan.
- [8] Harahap FPI, Anggraini T, Kusmilawaty. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Istiqamah Store Di Lhoksemauwe *Student Research Journal*;1(5) 2023; 342–56.
- [9] Saidah R. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO 109) 2019 *Jurnal UNIKS*. Vol 1(2) :571–83.
- [10] Hamongsina K, Sumual FM, Tala OY. Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada KM.Sirene). *Jurnal Akuntansi Manado* 2022;3(03):376–86. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3401>.
- [11] Dalimunthe MZ, Nurlaila N, Hermain H. Persepsi Pelaku UMKM Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK-ETAP di Kabupaten Serdang Bedagai Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2023; 9(02) <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9504>.
- [12] Aprilia A, Lilianti E, Saladin H. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Dekultur Coffee di Kota

- Palembang. *Jurnal Mediasi Akuntansi*, 2023;6(01):16–29.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13171>.
- [13] Nurjannah, nurwani, imran r. Analisis pengelolaan keuangan bantuan operational sekolah (bos) di sdn 187 dante malua desa ledan kec. Buntu batu kab.enreakang. *Jurnal Ekonomi dan bisnis* 2023; 4 (02) :206–14.
- [14] Azizah Rachmanti DA, Hariyadi M, Andrianto A. Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal Balance*.2019;16(01).
<https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2453>.
- [15] Sholihat W, Hairudin A. Analisis Implementasi Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,Kecil,dan Menengah (SAK-EMKM) (Studi Kasus Pada UMKM 7 Saudara) *JurnalambitekStieMahaputra-RiauAcId* 2021;1:70–9.
- [16] Mamun S, Sismona E. Analisis Penerapan Sstandar Aakutansi Keuangan No. 101 Tentang Laporan Keuangan Syari'ah (Studi Kasus KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU)). *Jurnal Ekonomi Syariah pelita bangsa* 2020; 5(02):186–97.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.116>
- [17] Afriansyah B, Niarti U, Hermelinda T. Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) *Jurnal Sainifik (Multi Science Journal)* 2021; 19(01):25–30.
<https://doi.org/10.58222/js.v19i1.99>.
- [18] Yulianasari N. Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Dalam Memperoleh Pembiayaan Kredit (Studi Kasus di Sentral Oleh-oleh Cita Rasa Kota Bengkulu)". *Junal Akunt Unihaz*, 2020; 3(01) :51–65.
- [19] Lutfillah NQ, Putri BLA. Hambatan Desain dan Implementasi Aplikasi Laporan Keuangan untuk UMKM (Barriers to the Design and Implementation of Financial Reporting Applications for MSMEs). *Akunt Bisnis Manaj(ABM)*2024;31.
<https://doi.org/10.35606/jabm.v31i1.1388>.
- [20] Arodhiskara Y, Ladung F, Jumriani J, Suherman S. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare . *Studi Kasus Inovasi Ekomi*. 2022V;6 (02):1–8.
<https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.21686>.
- [21] Zulfahmi, Hasan B,Darwanis. Analalisis Akuntanbilitas Keuangan Pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh.*Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 2016; 10(02):105-109